



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

**DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kutai Kartanegara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh bidang-bidang lingkup Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara . Untuk itu, seluruh program kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, Kontrak Kinerja (Perjanjian Kinerja) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Bupati Kutai Kartanegara tahun 2021, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan 2016-2021 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan 2021-2026 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan tahun 2021 sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan 2016-2021 ada 3 (tiga) yaitu **(1). Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan** target 2021 sebesar 81 dengan Sasaran **Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan** dengan realisasi mencapai 98% **(2). Persentase Penurunan Pekebun Miskin** terget 2021 sebesar 5% dengan sasaran **Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan** dengan realisasi mencapai 100%, **(3) Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan** target 2021 sebesar 10,15 dengan sasaran **Meningkatnya Produktivitas Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan** dengan realisasi mencapai 24%.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021. Capaian Kinerja tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada setiap akhir tahun anggaran senantiasa menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk dilaporkan kepada Bupati Kutai Kartanegara. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran dan penilaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara telah didukung dengan elektronik Planning yaitu aplikasi sistem perencanaan dan (e-Pantau) aplikasi realisasi kegiatan yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkebunan di Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, dan realisasi kinerja dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang kami lakukan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 ini, kami harapkan agar terjadi optimalisasi peran peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance.

Tenggarong, 17 Februari 2021

Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Ir. Muhammad Taufik
NIP. 19670625 199203 1 007

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	3
E. Struktur Organisasi	4
F. Sistematika	7
Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja	
A.. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	8
B. Perjanjian Kinerja	16
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja	22
B. Realisasi Anggaran	36
Bab IV Penutup	
Lampiran-Lampiran	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
2. Matrik Pengukuran Kinerja Tahun 2021	
3. Laporan Realisasi Program/Kegiatan Terhadap IKU 2021	
4. Matrik Capaian Kinerja 2016-2021	
5. Laporan Realisasi Keuangan Terhadap IKU 2021	
6. Rencana Aksi 2021	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 dibuat dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara serta sebagai bahan pedoman dalam peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, serta untuk memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi bupati kutai kartanegara sesuai dengan target Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan 2016-2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan instansi pemerintahan selama satu tahun. Laporan kinerja disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 dibuat untuk menyajikan laporan mengenai hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021. Dengan disusunnya LKJIP Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Mendorong Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan Kepada masyarakat terhadap Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 73 tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 55 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perkebunan.
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 96 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan 2016-2021, khususnya pada tahun 2021 serta meyakinkan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja utama yang dituangkan dan ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021.

D. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

1. Kedudukan

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 55 Tahun 2016 Tanggal 24 Oktober 2016 OPD Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Perkebunan

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana maksud diatas, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Perkebunan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perkebunan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perkebunan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Perkebunan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

E. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2016 Tanggal 1 September 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana Dinas Perkebunan merupakan Dinas Perkebunan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perkebunan.

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari :

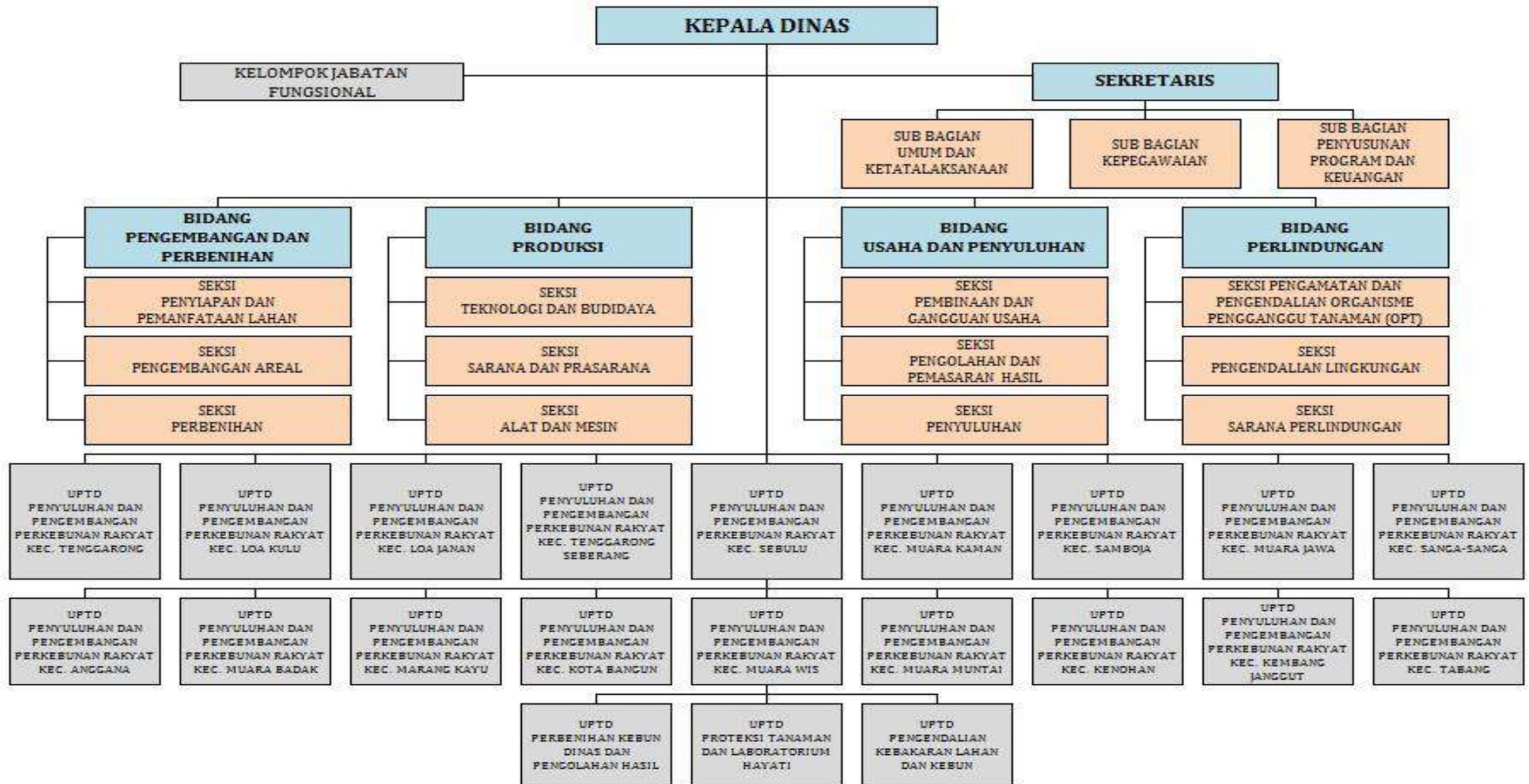
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 - b. Sub Bagian Kepegawain; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
3. Bidang Pengembangan dan Perbenihan, membawahkan :
 - a. Seksi Penyiapan dan Pemanfaatan Lahan;
 - b. Seksi Pengembangan Areal; dan
 - c. Seksi Perbenihan.
4. Bidang Sarana Produksi, membawahkan :
 - a. Seksi Teknologi dan Budidaya;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - c. Seksi Alat dan Mesin.
5. Bidang Usaha dan Penyuluhan, membawahkan :
 - a. Seksi Pembinaan dan Gangguan Usaha;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil; dan
 - c. Seksi Penyuluhan.
6. Bidang Perlindungan, membawahkan :
 - a. Seksi Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 - b. Seksi Pengendalian Lingkungan; dan
 - c. Seksi Sarana Perlindungan.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional sub sektor Perkebunan yang meliputi 18 Kecamatan, sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai 21 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perkebunan yaitu :

1. UPT Penyuluhan dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Tenggarong.
2. UPT Penyuluhan dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Loa Kulu.
3. UPT Penyuluhan dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Loa Janan.
4. UPT Penyuluhan dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Tenggarong Seberang.
5. UPT Penyuluhan dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Sebulu.
6. UPT Penyuluhan dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Muara Kaman.

7. UPT Penyuluhan dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Samboja.
8. UPT Penyuluhan dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Muara Jawa.
9. UPT Penyuluhan dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Sanga-Sanga.
10. UPT Penyuluhan dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Anggana.
11. UPT Penyuluhan dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Muara Badak.
12. UPT Penyuluhan dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Marang Kayu.
13. UPT Penyuluhan dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Kota Bangun.
14. UPT Penyuluhan dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Muara Wis.
15. UPT Penyuluhan dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Muara Muntai.
16. UPT Penyuluhan dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Kenohan.
17. UPT Penyuluhan dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Kembang Janggut.
18. UPT Penyuluhan dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Tabang
19. UPT Pembenihan Kebun Dinas dan Pengolahan Hasil.
20. UPT Proteksi Tanman dan Laboratorium Hayati.
21. UPT Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



F. Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan :

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
- E. Struktur Organisasi
- F. Sistematika

BAB II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV : Penutup

BAB II PERENCANAAN DAN PEJANJIAN KINERJA

A. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 bahwa Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan bagian dari RPJMD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya RPJMD merupakan turunan dari Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sasaran RPJMD termasuk program prioritas yang akan dicapai melalui Renstra OPD selama lima tahun. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dasar bagi seluruh stakeholders subsektor perkebunan dan setiap elemen aparatur di lingkup Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan program dan kegiatan selama jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Visi dan Misi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021

1. Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2016-2021 tersebut, maka Visi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara di selaraskan dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Yaitu :

*‘ Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara
Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan ‘*

Penjabaran makna dari visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Yaitu :

- MAJU** : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pada semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang responsif, merata, berkualitas, dan berbasis kemajuan teknologi.
- MANDIRI** : Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kemampuan dalam mendayagunakan segenap potensi sumber daya yang dimiliki (ekonomi, sosial, budaya, sumber daya alam dan energi) berbasis kearifan lokal dan menurunnya disparitas

pembangunan antar wilayah serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

SEJAHTERA : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat didukung pemenuhan hak pelayanan dasar masyarakat yang meliputi tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang tinggi, pemenuhan derajat kesehatan masyarakat, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran rendah. Selain itu sejahtera juga diarahkan untuk kondisi masyarakat yang bermartabat, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki kehidupan dalam suasana yang aman dan damai.

BERKEADILAN: Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang adil dan merata, tanpa diskriminasi baik antar individu maupun golongan yang berdasarkan keadilan gender serta perlindungan anak.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016- 2021, Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Misi 1 : Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat.
2. Misi 2 : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten.
3. Misi 3 : Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah.
4. Misi 4 : Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah.
5. Misi 5 : Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah.
6. Misi 6 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
7. Misi 7 : Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, maka misi-misi Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

- Misi 1 : Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat.
Misi 2 : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten.
Misi 4 : Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah.

Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026

3. Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2021-2026 tersebut , maka Visi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara di selaraskan dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Yaitu :

‘Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia’

Penjabaran makna dari visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Yaitu :

Masyarakat yang sejahtera adalah batasan pengertian sejahtera, kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan. Diharapkan dari kemudahan mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat dan akses terhadap sumber daya ekonomi maka masyarakat semakin sejahtera.

Masyarakat yang berbahagia adalah kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketenteraman diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dari menjaga keharmonisan dan peningkatan terhadap pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat membuat warga Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berbahagia.

Selain visi dan misi, Edi Damansyah dan Rendi Solihin Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan filosofi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yaitu **KUKAR IDAMAN**, Idaman secara etimologi berarti sesuatu yang diharapkan, yang didambakan, yang dicita-citakan. Sedangkan untuk akronim berarti inovatif, daya saing dan mandiri (Idaman), Kukar Idaman ialah satu gerakan yang mengoptimalkan

seluruh potensi daerah, dengan mendorong Kreativitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dan menciptakan daya saing kemandirian yang didasari semangat kolaborasi dan sinergisitas antara pemerintah Kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan kuar lebih baik ke depan.

4. Misi

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara -cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan komitmen dan konsisten kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2021-2026, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Sebagai Berikut :

1. Misi 1 : Memantapkan Birokrasi Yang Bersih , Efektif, Efisien Dan Melayani.
2. Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.
3. Misi 3 : Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4. Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah.
5. Misi 5 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Dari visi dan misi pada Rancangan RPJMD Kabupaten Kutai Karatanegara tahun 2021-2026 diatas tampak jelas bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Karatanegara berhubungan dengan misi ke tiga. Sesuai Rancangan RPJMD Kabupaten Kutai Karatanegara tahun 2021-2026 sektor perkebunan akan memainkan peran yang penting, secara langsung akan mengemban amanah untuk mensukseskan **Misi (3) Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.**

5. Tujuan

Sebagai salah satu komponen penting dalam perencanaan strategis, bahwa tujuan dapat dirumuskan sebagai gambaran tentang keadaan yang diinginkan atau dicita-citakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan sebuah upaya dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-202. Tujuan jangka menengah ini ditetapkan untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada masa mendatang. Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam

melaksanakan tugas mendukung pencapaian Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun Tujuan pembangunan bidang Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan Dinas Perkebunan ”
2. Meningkatkan Tingkat Pendapatan Pekebun Rakyat.
3. Meningkatkan PAD Sub Sektor Perkebunan.
4. Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perkebunan.

6. Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021, dapat dilihat pada tabel di Bawah Ini :

Tabel 1 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021, dapat dilihat pada tabel di Bawah Ini :

Visi : Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan			
MISI I : Memantapkan Reformasi Birokrasi Rakyat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Pemantapan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi, Sarana, Prasarana dan Disiplin Aparatur, Serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perkebunan
MISI II : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Pemantapan Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan
MISI IV : Meningkatkan Pengelolaan Pertanian Dan Pariwisata Untuk Percepatan Transformasi Struktur Ekonomi Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Dalam Arti Luas	Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan	Peningkatan Luas Areal Perkebunan	Penyiapan dan Pemanfaatan Lahan, Pengembangan Areal Perkebunan dan Kebun Dinas, Pembibitan Tanaman Perkebunan, serta Kemitraan Usaha Perkebunan (Plasma)
		Peningkatan Produksi Perkebunan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi, Pengadaan Alat dan Mesin, Pengembangan Teknologi dan Budidaya Perkebunan, Rehab/Peremajaan Tanaman Perkebunan, Dukungan Perlindungan Perkebunan, Pembinaan Usaha Perkebunan, serta Penyuluhan Perkebunan
		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Dukungan Pemasaran Hasil Perkebunan & Penyediaan Informasi Harga Pasar Hasil Komoditas Perkebunan

Tabel 2 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, dapat dilihat pada tabel di Bawah Ini :

Visi : Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia									
Misi III : Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	1. Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan	1. Mengembangkan komoditas unggulan dan andalan berbasis kawasan dan korporasi	1. Penyediaan reviu rencana aksi pengembangan komoditas unggulan dan andalan perkebunan berbasis kawasan dan korporasi	v					
			2. Pengembangan dan intensifikasi tanaman perkebunan yang dititikberatkan pada komoditas unggulan dan andalan berbasis kawasan secara terintegrasi, mulai dari kepastian ketersediaan lahan, penyiapan petani unggulan dan dukungan sarana, prasarana dan infrastruktur wilayah	v	v	v	v	v	
	2. Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan	1. Meningkatkan Perlindungan Perkebunan	1. Peningkatan perlindungan tanaman serta penanggulangan bencana dan gangguan usaha perkebunan	v	v	v	v	v	
			2. Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha perkebunan	v	v	v	v	v	
	3. Meningkatnya kesejahteraan pekebun	1. Memperkuat penyuluhan dan pendampingan kepada pekebun	1. Peningkatan penyuluhan perkebunan dan pengembangan pekebun milenial	v	v	v	v	v	
			2. Pengembangan kemitraan usaha perkebunan yang produktif dan sehat dan pengolahan hasil perkebunan	v	v	v	v	v	
		2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing Komoditas Perkebunan							

7. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara tahun 2021 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dan Perubahan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021, ada tiga yaitu :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan.
2. Persentase Penurunan Pekebun Miskin.
3. Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan.

Adapun Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur keberhasilan Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara tahun 2021 sesuai Perubahan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3 : Sasaran strategis dan indikator kinerja utama beserta target.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	65	68	72	76	81
2	Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Persentase Penurunan Pekebun Miskin	0	0	5	5	5
3	Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	8,68	9,03	9,39	9,76	10,15

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 mengalami perubahan dengan satu indikator tujuan dan tiga indikator sasaran, yaitu :

Indikator Utama : Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan dengan 3 sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan
- b. Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan
- c. Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun

B. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam Perubahan Rencana Strategis tahun 2016-2021 maka disusunlah Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021. Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan dalam hal ini antara Bupati sebagai pengambil kebijakan dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana kebijakan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas. Adapun tujuan Perjanjian Kinerja, adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya.
3. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah.
4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur.
5. Untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah.

Perjanjian Kinerja memuat dua unsur pokok yaitu pernyataan perjanjian kinerja yang harus ditanda tangani oleh penanggungjawab program dengan atasan langsung dan lampiran yang berisi tentang target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir periode penganggaran.

Adapun Perjanjian Kinerja Pada Dinas Perkebunan Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 4 : Perjanjian Kinerja Pada Dinas Perkebunan Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	Nilai	81
		Temuan Administrasi BPK/Inspektorat yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	2
		Jumlah Aset Kendaraan yang di tertibkan	Jumlah	40
		Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	23
		Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Perubahan Pada Aplikasi Sirup (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 dan Maksimal 14 Hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2023)	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2021	Persen	100

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2021	Persen	100
		Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70
2	Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Persentase Penurunan Pekebun Miskin	Persen	5
3.	Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	Persen	10,15
4.	Membantu Kepala Daerah dalam Penyiapan dan Perumusan Kebijakan berdasarkan Data	Jumlah Luas Areal Perkebunan Rakyat	Ha	261.128
		Jumlah Produksi Perkebunan	Ton	2.576.843
5.	Meningkatnya ketersediaan rumusan alternative kebijakan daerah berbasis data dan Informasi sesuai dengan fungsi Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan rumusan alternative kebijakan yang strategis dan insidental dalam bentuk dokumen telahaan staf	Persen	100
6.	Menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan Program dan berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);	Jumlah	100 (berdasarkan data target/ sektor dan lokus)

Adapun program yang menjadi pendukung Perjanjian Kinerja antara Bupati dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

Tabel 5 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Program yang mendukung

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program Pendukung IKU
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	81	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2	Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Persentase Penurunan Pekebun Miskin	5	Anggaran untuk menopang kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan Untuk APBD Kukar tahun 2021 tidak ada, akan tetapi kegiatan Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan ditopang oleh Dinas Perkebunan Prov. Kaltim

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program Pendukung IKU
3	Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	10,15	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Program perizinan usaha pertanian Program penyuluhan pertanian

Adapun kegiatan yang menjadi pendukung Perjanjian Kinerja antara Bupati dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

Tabel 6 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Kegiatan yang mendukung

No	Indikator Kinerja Utama	Kegiatan Pendukung IKU
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
2	Persentase Penurunan Pekebun Miskin	- Anggaran untuk menopang kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan Untuk APBD Kukar tahun 2021 tidak ada, akan tetapi kegiatan Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan ditopang oleh Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
3	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota 3. Pengembangan Prasarana Pertanian 4. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota 5. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 6. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Tabel 7 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Sub Kegiatan yang mendukung

No	Indikator Kinerja Utama	Kegiatan Pendukung IKU
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
		6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		7. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		8. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		15. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		17. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Persentase Penurunan Pekebun Miskin	- Anggaran untuk menopang kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan Untuk APBD Kukar tahun 2021 tidak ada, akan tetapi kegiatan Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan ditopang oleh Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
3	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	21. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
		22. Pengendalian Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
		23. Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B
		24. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya

No	Indikator Kinerja Utama	Kegiatan Pendukung IKU
25		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
26		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
27		Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
28		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
29		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
30		Pembentukan Badan Usaha Milik Petani

1. Anggaran Tahun 2021

Untuk mencapai kinerja yang sudah ditetapkan, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan kegiatan dengan memperoleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2021 sebesar Rp. 29.675.350.674 dengan rincian belanja pembayaran penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 22.745.446.033, dan rincian kegiatan pendukung IKU Rp. 6.929.904.641, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) sebesar Rp. 28.920.696.809, dengan rincian belanja pembayaran penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 22.186.838.596, dan rincian belanja kegiatan pendukung IKU sebesar Rp. 6.733.858.213, Anggaran Belanja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 8 : APBD Murni dan APBD Perubahan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

NO	KETERANGAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN
1	belanja pembayaran penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.745.446.033	22.186.838.596
2	Kegiatan pendukung IKU	6.929.904.641	6.733.858.213
Total		29.675.350.674	28.920.696.809

2. Alokasi Anggaran tahun 2021 Per Sasaran Strategis.

Untuk alokasi per Sasaran Strategis tahun anggaran 2021, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni Belanja Langsung tahun 2021 sebesar Rp. 6.929.904.641, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Belanja Langsung Sebesar Rp. 6.733.858.213, Anggaran Belanja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara per Sasaran Strategis tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 9 : APBD Murni dan APBD Perubahan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara per Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	5.028.961.240	4.540.368.912
2	Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan	-	-
3	Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan	1.900.943.401	2.193.489.301
Total		6.929.904.641	6.733.858.213

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 dilakukan dengan cara memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, persentase target dan persentase realisasi.

1. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2021.

Tabel 10 : Realisasi capain Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2021 :

No	Sasaran	Indikator kinerja utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	Nilai	81	79,76	98,47	Indikator Sasaran Strategis 1 belum tercapai secara kuantitatif, capaian kinerja sebesar 98,47% dengan formulasi perhitungan realisasi dibagi target dikali 100. Dimana realisasi berdasarkan hasil evaluasi SAKIP OPD Tahun 2020 Oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara
		Temuan Administrasi BPK/Inspektorat yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	2	1	50	Indikator Tambahan beum tercapai secara kuantitatif capaian kinerja sebesar 50%, dengan formulasi perhitungan realisasi dibagi target dikali 100 dimana realisasi berdasarkan data dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
		Jumlah Aset Kendaraan yang di tertibkan	Jumlah	42	40	95,24	Indikator tambahan belum tercapai secara kuantitatif capaian kinerja sebesar 95,24%, dengan formulasi perhitungan realisasi dibagi target dikai 100. Realisasi berdasarkan hasil desk antara Bidang Aset BPKAD dengan perangkat daerah dan ada koreksi target jumlah kendaraan yang harus ditertibkan awal 40; target dikoreksi 42, diselesaikan 40
		Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	23	23	31,74	Indikator tambahan belum tercapai secara kuantitatif capaian kinerja sebesar 31,74%, realisasi berdasarkan persentase capaian sesuai perhitungan dalam kertas kerja komponen pengamanan tanah oleh bidang Aset BPKAD

No	Sasaran	Indikator kinerja utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
		Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Perubahan Pada Aplikasi Sirup (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 dan Maksimal 14 Hari Kerja setelah kesepakatan kesepakatan RAPBD Tahun 2023)	Persen	100	100	100	Indikator tambahan tercapai secara kuantitatif capaian kinerja sebesar 100%, dengan formulasi perhitungan realisasi dibagi target dikali 100, realisasi berdasarkan data dari bagian pengadaan barang jasa sekretariat daerah Kab. Kukar terhadap indikator dengan melihat kesesuaian anggaran belanja SIPD dan Isian data RUP, per tanggal 30 Maret 2021, Pukul 12:02 Wita
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2021	Persen	100	100	100	Indikator tambahan tercapai secara kuantitatif capaian kinerja sebesar 100%, dengan formulasi perhitungan realisasi dibagi target dikali 100, realisasi berdasarkan data dari bagian organisasi sekretariat daerah kabupaten kutai kartanegara terhadap indikator
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2021	Persen	100	100	100	Indikator tambahan tercapai secara kuantitatif capaian kinerja sebesar 100%, dengan formulasi perhitungan realisasi dibagi target dikali 100, realisasi berdasarkan data dari bagian organisasi sekretariat daerah kabupaten kutai kartanegara terhadap indikator
		Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	54,93	91,55	Indikator tambahan belum tercapai secara kuantitatif capain kinerja sebesar 91,55%, dengan formulasi perhitungan realisasi dibagi target dikali 100. Realisasi Berdasarkan data dari Dinas Kearsipan dan peroustakaan Ka.b. Kukar
2	Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Persentase Penurunan Pekebun Miskin	Persen	5	5	100	Indikator Sasaran Strategis 2 tercapai secara kuantitatif capaian kinerja sebesar 100%, dengan formulasi perhitungan realisasi dibagi target dikali 100. Realisasi berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan Dinas Perkebunan provinsi Kalimantan Timur.
3	Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	Persen	10,15	2,40	24	Indikator Sasaran Strategis 3 tercapai secara kuantitatif capaian kinerja sebesar 24% dengan formulasi perhitungan realisasi dibagi target dikali 100. Realisasi berdasarkan perhitungan PDRB Sub Perkebunan dari BPS Kutai Kartanegara.
4	Membantu Kepala Daerah dalam Penyiapan dan Perumusan Kebijakan berdasarkan Data	Jumlah Luas Areal Perkebunan Rakyat	Ha	261.128	252.098	96,54	Indikator sasaran tambahan belum tercapai secara kuantitatif capaian kinerja sebesar 96,54%, dengan formulasi perhitungan realisasi luas perkebunan dibagi target jumlah luas areal perkebunan dikali 100
		Jumlah Produksi Perkebunan	Ton	2.576.843	2.977.934	115,57	Indikator sasaran tambahan tercapai secara kuantitatif capaian kinerja sebesar 115,57%, dengan formulasi perhitungan realisasi dibagi target dikali 100. Realisasi berdasarkan produksi perkebunan dibagi target produksi areal perkebunan dikali 100

No	Sasaran	Indikator kinerja utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
5	Meningkatnya ketersediaan rumusan alternative kebijakan daerah berbasis data dan Informasi sesuai dengan fungsi Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan rumusan alternative kebijakan yang strategis dan insidental dalam bentuk dokumen telaahan staf	Persen	100	100	100	Indikator tambahan sudah tercapai, capaian kinerja sebesar 100% dengan jumlah rumusan alternatif kebijakan sebanyak 10 rumusan. Realisasi berdasarkan data yang disampaikan perangkat daerah
6	Menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan Program dan berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);	Jumlah	100 (berdasarkan data target/ sektor dan lokus)	100	100	Indikator Sasaran Strategis 2 tercapai secara kuantitatif capaian kinerja sebesar 100%, dengan formulasi perhitungan realisasi dibagi target dikali 100. Realisasi berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan Dinas Perkebunan provinsi Kalimantan Timur. Dimana Target 13 orang pekebun miskin realisasi 13 orang pekebun.

2. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Target Tahun 2021.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 realisasi yang dicapai dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui beberapa kegiatan yang menjadi pendukung dari Indikator Kinerja Utama semuanya hampir mencapai target. Adapun realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dijabarkan melalui tabel dibawah ini :

Tabel 11. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)
			2021	2021	2021
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	81	79,76	98
2	Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Persentase Penurunan Pekebun Miskin	5	5	100
3	Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	10,15	2,40	24

Tabel 9 menunjukkan tentang realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan target dan realisasi pencapaian di tahun 2021 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan dengan Indikator Kinerja Utama Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Rasio Capaian 98% dimana realisasi lebih kecil dari target.
2. Sasaran Strategis Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Pekebun Miskin memiliki Rasio Capaian 100%.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan dengan Indikator Kinerja Utama Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan realisasi rasio capaian 24 % dimana realisasi lebih kecil dari target.

3. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Program/Kegiatan Tahun 2021

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 realisasi yang dicapai dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan melalui beberapa kegiatan yang menjadi pendukung dari Indikator Kinerja Utama semuanya mencapai rata-rata 98 %. Adapun realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan dapat di jabarkan melalui tabel dibawah ini :

Tabel 12. Target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan program/kegiatan tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
				2021	2021
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	77,00	79.76
			1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen
			a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen
			b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	2 dokumen
			c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen
			2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan
			a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15 laporan	15 laporan
			3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen
			a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan
			b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
				2021	2021
			4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen
			a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21 orang	19 Orang
			b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	15 Orang
			5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 layanan	7 layanan
			a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 jenis	6 jenis
			b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26 Jenis	26 Jenis
			c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 Jenis	5 Jenis
			d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	3 jenis	3 jenis
			e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000 eksemplar	3.000 eksemplar
			f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	495 orang/hari	495 orang/hari
			g. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,352 berkas	1,352 berkas
			6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan
			a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan
			b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan
			c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan, 2 kali, 1 kegiatan	12 bulan, 2 kali, 1 kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
				2021	2021
			7. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	121 unit	121 unit
			a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117 unit roda 4 dan roda 2	117 unit roda 4 dan roda 2
			b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 unit	4 unit
2	Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Persentase Penurunan Pekebun Miskin	-	-	-
3	Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	I Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	248.161 Ha	252,132 Ha
			1 Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	65 Unit	65 Unit
			a. Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	65 Unit	65 Unit
			2 Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan
			a. Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1.500 benih	1.500 benih
			II Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen
			1 Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	1 dokumen	1 dokumen
			a. Sub Kegiatan Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 dokumen	1 dokumen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
				2021	2021
			b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	1 dokumen	1 dokumen
			III Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	93,33%	91,47%
			1 Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	100 Ha	128 Ha
			a. Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	40 Ha	49 Ha
			b. Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	21.550 Ha	23.173 Ha
			c. Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	10 kelompok	16 kelompok
			IV Program Perizinan Usaha Pertanian	200 surat (STDB) dan 21 surat (PUP)	159 Surat (STDB) dan 12 Surat (PUP)
			1 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	221 pelaku	171 pelaku
			a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	200 surat (STDB) dan 21 surat (PUP)	159 Surat (STDB) dan 12 Surat (PUP)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
				2021	2021
			V Program Penyuluhan Pertanian	1,91%	1,91%
			6 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	9 kelompok tani	22 kelompok tani
			a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	5 Kelompok Tani	18 kelompok tani
			b. Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	4 lembaga	4 lembaga

4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Beberapa Tahun Yang Lalu

Tabel 13. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan beberapa tahun yang lalu

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	67	69	79,54	79,76	79,76
2	Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Persentase Penurunan Pekebun Miskin	0	0	0	5	5
3	Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	8,68	6,53	7,04	7,00	2,40

Catatan : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan (SAKIP) tahun 2021 masih nilai perkiraan/semestara

Berdasarkan tabel perbandingan antara realisasi tahun 2021 dengan Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis mengalami peningkatan dan penurunan di tahun 2021 dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Untuk realisasi target Sasaran Strategis Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan tahun 2021 capaian nilainya diperkirakan lebih tinggi dari tahun 2017, dan 2018, dan sama dengan tahun 2019 dan 2020.
2. Untuk realisasi target Sasaran Strategis Meningkatkan Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan tahun 2021 nilainya sama dengan tahun 2020, walaupun tidak ada Anggaran untuk menopang kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan Untuk APBD Kukar tahun 2021, akan tetapi kegiatan Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan ditopang oleh Dinas Perkebunan Prov. Kaltim

3. Untuk realisasi target Sasaran Strategis Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan tahun 2021 capaian nilainya lebih rendah dari tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang menyebabkan PDRB sub perkebunan menurun diantaranya rendahnya harga jual komoditi lada dan karet, tingginya harga beli pupuk, banyaknya alih fungsi lahan perkebunan. Walaupun realisasi luas tanam dan produksi sub sektor perkebunan meningkat dari target, akan tetapi tidak bisa meningkatkan PDRB sub sektor perkebunan secara signifikan dan PDRB sub sektor perkebunan yang bisa menilai naik dan turunnya adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara

5. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Beberapa Tahun Yang Lalu

Tabel 14. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan beberapa tahun yang lalu

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja					Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	65	68	72	76	81	67	69	79,54	79,76	79,76
2	Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Persentase Penurunan Pekebun Miskin	0	0	5	5	5	0	0	0	5	5
3	Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	8,68	9,03	9,39	9,76	10,15	8,68	6,53	7,04	7,00	2,40

Catatan : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan (SAKIP) tahun 2021 masih nilai perkiraan/sementara

Berdasarkan table 10, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Perkebunan mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, adapun penjelasan sebagai berikut.

1. Untuk realisasi target Sasaran Strategis Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan capaian nilainya mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai dengan 2021
2. Untuk realisasi target Sasaran Strategis Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan tahun 2021 nilainya sama dengan tahun 2020 walaupun tidak ada Anggaran untuk menopang kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan Untuk APBD Kukar tahun 2021, akan tetapi kegiatan Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan ditopang oleh Dinas Perkebunan Prov. Kaltim.

3. Untuk realisasi target Sasaran Strategis Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan realisasi capaian kinerja mengalami kenaikan dari tahun 2018, 2019, 2020 dan mengalami penurunan di tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya adanya beberapa faktor yang menyebabkan PDRB sub perkebunan menurun diantaranya rendahnya harga jual komoditi lada dan karet, tingginya harga beli pupuk, banyaknya alih fungsi lahan perkebunan. Walaupun realisasi luas tanam dan produksi sub sektor perkebunan meningkat dari target, akan tetapi tidak bisa meningkatkan PDRB sub sektor perkebunan secara signifikan dan PDRB sub sektor perkebunan yang bisa menilai naik dan turunnya adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara

6. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternative solusi yang dilakukan.

Dari analisis berdasarkan table-tabel diatas, tidak semua sasaran strategis mencapai target dimana ada beberapa yang mengalami penurunan di realisasi capaian tiap tahunnya akan tetapi masih mencapai target dan ada yang tidak mencapai target sama sekali dan mengalami penurunan tiap tahunnya. Faktor-faktor penyebab peningkatan atau penurunan kinerja serta solusinya bisa dijabarkan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Sasaran Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan dengan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan pada tahun 2021 dibawah target yaitu sebesar 98 % dimana target di tahun 2021 adalah 81,00 sedangkan realisasi sementara $\pm 79,76$. Dimana Sasaran ini memuat 1 program yaitu, program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dengan realisasi 100%.
2. Sasaran Strategis Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan dengan Indikator Kinerja Persentase Penurunan Pekebun Miskin realisasi kinerja tahun 2021 sesuai target dengan capaian 100%. Walaupun ditahun 2021 tidak ada program dan kegiatan di Dinas Perkebunan Kab. Kutai Kartanegara yang mendukung sasaran ini, akan tetapi sasaran ini di dukung oleh kegiatan Dinas Perkebunan Propinsi Samarinda.
3. Sasaran Strategis Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan dengan Indikator Kinerja Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan realisasi kinerja lebih kecil dari target yaitu sebesar 24%. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang menyebabkan PDRB sub perkebunan menurun. Walaupun realisasi luas tanam dan produksi perkebunan meningkat dari target hal ini tidak bisa meningkatkan PDRB sub perkebunan secara total dikarenakan PDRB perkebunan tidak hanya dipengaruhi sub bidang perkebunan akan tetapi dari sub bidang lain. Dan yang bisa menilai dan menghitung PDRB sub perkebunan adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dimana sasaran ini didukung 5 program yaitu,

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian realisasi 100%
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian realisasi 100%
3. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian realisasi 99,8%,
4. Program Perizinan Usaha Pertanian realisasi 82,5%
5. Program Penyuluhan Pertanian Realisasi 100%.

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mencapai target atas Indikator Kinerja Utama diperlukan sumber daya baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun pembiayaan. Tabel berikut ini memberikan gambaran perbandingan antara rata-rata persentase capaian kinerja dan persentase penyerapan anggaran program serta penggunaan sumber daya yang ada.

Tabel 15. Tingkat efisiensi pengguna sumber daya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA %	PENYERAPAN ANGGARAN %	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	98	83,79	Tidak Efisien
2	Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Persentase Penurunan Pekebun Miskin	100	-	100
3	Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	24	91,51	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persentase antara penyerapan anggaran lebih rendah dari capaian kinerja. Hal ini dapat diartikan efisiensi sumber daya berupa anggaran sudah berhasil dilakukan dikarenakan realisasi capaian kinerja lebih besar dari capaian realisasi keuangan.

8. Analisis Program/Kegiatan/Subkegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program merupakan suatu operasionalisasi dari strategi atau kebijakan Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan dengan cakupan teknis lebih mendalam dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam pelaksanaannya, setiap program harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah agar selalu berada dalam satu koridor pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara global. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi.

Adapun realisasi program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut.

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Realisasi program penunjang urusan pemerintahan daerah adalah 100% dan dari target program 100%.

Program ini terdiri dari 7 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah realisasi kegiatan 100%, dari target 10 Dokumen realisasi 10 Dokumen, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah realisasi kegiatan 100%, dari target 4 Dokumen realisasi 4 Dokumen.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi kegiatan 100%, dari target 2 Dokumen realisasi 2 Dokumen.
 - c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah realisasi kegiatan 100%, dari target 4 Dokumen realisasi 4 Dokumen.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah realisasi kegiatan 100%, dari target 15 Laporan realisasi 15 Laporan, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN realisasi kegiatan 100%, dari target 12 Bulan realisasi 12 Bulan.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD realisasi kegiatan 100%, dari target 15 Laporan realisasi 15 Laporan.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah realisasi kegiatan 100%, dari target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD realisasi 100%, dari target 1 laporan realisasi 1 laporan.
 - b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD realisasi 100%, dari target 1 laporan realisasi 1 laporan
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah realisasi kegiatan 100%, dari target 2 Dokumen realisasi 2 Dokumen, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi realisasi 90%, dari target 21 orang realisasi 19 orang.
 - b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan realisasi 100%, dari target 15 orang realisasi 15 orang
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah realisasi kegiatan 100%, dari target 7 layanan realisasi 7 layanan, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor realisasi 100%, dari target 6 jenis realisasi 6 jenis.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisasi 100%, dari target 26 jenis realisasi 26 jenis.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor realisasi 100%, dari target 5 jenis realisasi 5 jenis.
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan realisasi 100%, dari target 3 jenis realisasi 3 jenis.
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan realisasi 100%, dari target 3.000 eksemplar realisasi 3.000 eksemplar.
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi 100%, dari target 495 orang/hari realisasi 495 orang/hari.
 - g. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD realisasi 100%, dari target 1,352 berkas realisasi 1,352 berkas.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi kegiatan 100%, dari target 12 Bulan realisasi 12 Bulan, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi 100%, dari target 12 Bulan realisasi 12 Bulan.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisasi 100%, dari target 12 Bulan realisasi 12 Bulan.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor realisasi 100%, dari target 12 Bulan, 2 kali dan 1 Kegiatan realisasi 2 Bulan, 1 kali dan 1 Kegiatan
7. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah realisasi kegiatan 100%, dari target 121 Unit realisasi 121 Unit, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi 100%, dari target 117 unit roda 4 dan roda 2 realisasi 117 unit roda 4 dan roda 2.
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya realisasi 100%, dari target 4 realisasi 4 unit.

b) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Realiasi program penunjang urusan pemerintahan daerah adalah 100% dari Target 248.161 Ha dan Realisasi 252.132 Ha.

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian realisasi kegiatan 100%, dari target 65 Unit realisasi 65 Unit , dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian realisasi 100%, dari target 104 Ha dan 65 Unit realisasi 100 Ha dan 107 Unit.

2. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota realisasi kegiatan 100%, dari target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen , dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak realisasi 100%, dari target 1.500 Bibit realisasi 1.500 Bibit.

c) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Realisasi program penunjang urusan pemerintahan daerah adalah 100% dari Target 1 Dokumen dan 1 Dokumen

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu

1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian realisasi kegiatan 100%, dari target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen , dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B realisasi 100%, dari target 1 dokumen dan 1 dokumen.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya realisasi 100%, dari target 1 dokumen dan 1 dokumen.

d) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Realisasi program penunjang urusan pemerintahan daerah adalah 91.47% dari Target 93.33% dengan capaian program sebesar 99,8%

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota realisasi kegiatan 100%, dari target 100 Ha realisasi 128 Ha , dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan realisasi 100%, target 40 Ha realisasi 49 Ha.
 - b. Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan realisasi 100%, target 21.550 Ha realisasi 23.173 Ha.
 - c. Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan realisasi 100%, target 10 kelompok realisasi 16 kelompok.

e) Program Perizinan Usaha Pertanian

Realisasi program penunjang urusan pemerintahan daerah adalah dari Target 82,5 %, dari target 200 Surat (STDB) dan 21 Surat (PUP) dengan realisasi 159 Surat (STDB) dan 12 Surat (PUP).

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota realisasi kegiatan 82,5 %, dari target 221 Pelaku dengan realisasi 171 Pelaku, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian realisasi 82,5 %, dari target 200 Surat (STDB) dan 21 Surat (PUP) dengan realisasi 159 Surat (STDB) dan 12 Surat (PUP).

f) Program penyuluhan pertanian

Realisasi program penunjang urusan pemerintahan daerah adalah 100 %, dari 1.91% dengan realisasi 1.91%.

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian realisasi kegiatan 100%, dari target 9 kelompok tani dengan realisasi 22 kelompok tani, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa realisasi 100 %, dari target 5 kelompok tani dengan realisasi 18 kelompok tani.
 - b. Sub Kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani realisasi 100 %, dari target 4 lembaga dengan realisasi 4 lembaga.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan kegiatan dengan memperoleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni tahun 2021 sebesar Rp. 29.675.350.674 dimana untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN termasuk di dalamnya dengan rincian Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 22.186.838.596 dan Belanja Kegiatan sebesar Rp. 6.929.904.641 dan mendapat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) sebesar Rp. 28.920.696.809, dimana untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN termasuk di dalamnya dengan rincian Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 22.186.838.596 dan Belanja Kegiatan sebesar Rp. 6.733.858.213 Dengan realisasi mencapai 84,37% dari Total Pagu APBD-Perubahan dengan rincian belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 81,88% dan belanja Kegiatan sebesar 92,55%. Belanja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada table berikut

Tabel 16. Realisasi anggaran berdasarkan total keseluruhan

NO	KETERANGAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	REALISASI	REALISASI %
1	Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.745.446.033	22.186.838.596	181.68.416.687	81.89
2	Belanja Kegiatan	6.929.904.641	6.733.858.213	6.232.310.095	92.55
Total		29.675.350.674	28.920.696.809	24.400.726.782	84.37

Tabel 17. Realisasi anggaran berdasarkan Indikator Kinerja Utama

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	26.727.207.508	22.393.456.326	83,79
2	Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Persentase Penurunan Pekebun Miskin	0	0	0
3	Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	2.193.489.301	2.007.270.456	91,51

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran rata rata diatas dibawah 100% persen, dengan penjabaran Sasaran Strategis Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan 83,79%, Sasaran Strategis Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan 0% dan Sasaran Strategis Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan 91,51%.

Sedangkan realisasi anggan berdasarkan program kegiatan dan Sub Kegiatan dapat diliat di table berikut ini.

Tabel 18. realisasi anggan berdasarkan program dan kegiatan dapat diliat di table berikut ini

NO	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		APBD (Rp)	APBD-P (Rp)	REALISASI	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	27.774.407.273	26.727.207.508	22.393.456.326	83.78
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	762.444.000	543.768.400	458.876.800	84.38
	a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	443.068.000	276.480.000	227.743.400	82.37
	b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	84.000.000	84.000.000	62.900.000	74.88
	c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	235.376.000	183.288.400	168.233.400	91.78

NO	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		APBD (Rp)	APBD-P (Rp)	REALISASI	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.973.566.033	22.282.178.596	18.263.756.687	81.96
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.745.446.033	22.186.838.596	18.168.416.687	81.88
	b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	228.120.000	95.340.000	95.340.000	100
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	121.400.000	121.400.000	120.700.000	99.42
	a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	81.660.000	81.660.000	81.660.000	100
	b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	39.740.000	39.740.000	39.040.000	98.23
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	253.736.200	232.458.200	229.848.200	98.87
	a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	183.736.200	162.458.200	161.348.200	99.32
	b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70.000.000	70.000.000	68.500.000	97.86
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,156,574,880	1.066.403.071	1.045.755.598	98.06
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.225.000	8.225.000	8.225.000	100
	b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	288.448.880	347.385.071	331.789.290	95.51
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.578.000	8.420.000	8.420.000	100
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.020.000	55.020.000	55.020.000	100
	e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.860.000	25.860.000	25.860.000	100

NO	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		APBD (Rp)	APBD-P (Rp)	REALISASI	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550.465.000	486.515.000	482.271.253	99.13
	g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	134.978.000	134.978.000	134.170.055	99.40
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.936.424.100	1.910.796.100	1.714.201.372	89.71
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	339.481.092	339.481.092	249.398.008	73.46
	b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.693.000	78.693.000	76.127.900	96.74
	c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.518.250.008	1.492.622.008	1.388.675.464	93.04
7	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	570.262.060	570.203.141	560.317.669	98.27
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	399.598.000	39.959.8000	392.180.703	98.14
	b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170.664.060	170.605.141	168.136.966	98.55
II	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1,064,415,401	1.420.975.401	1.288.850.100	90.70
1	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	964,415,401	1.3243.554.01	1.210.180.100	91.38
	a. Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	964,415,401	1.324.355.401	1.210.180.100	91.38
2	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100,000,000	96.620.000	78.670.000	81.42
	a. Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	100,000,000	96.620.000	78.670.000	81.42

NO	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		APBD (Rp)	APBD-P (Rp)	REALISASI	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
III	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100.000.000	139.747.700	139.012.400	99.47
1	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	100.000.000	139.747.700	139.012.400	99.47
	a. Sub Kegiatan Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	100.000.000	69.009.000	68.944.000	99.91
	b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	0	70.738.700	70.068.400	99.91
IV	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	300.000.000	256.633.200	255.605.000	99.59
1	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	300.000.000	256.633.200	255.605.000	99.59
	a. Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100.000.000	97.445.000	97.125.000	99.67
	b. Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100.000.000	81.278.200	80.900.000	99.53
	c. Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100.000.000	77.910.000	77.580.000	99.57
V	Program Perizinan Usaha Pertanian	100.000.000	87.115.000	82.437.956	94.63
1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	87.115.000	82.437.956	94.63
	a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	100.000.000	87.115.000	82.437.956	94.63

NO	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		APBD (Rp)	APBD-P (Rp)	REALISASI	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
VI	Program Penyuluhan Pertanian	336,528,000	289.018.000	241.365.000	83.51
1	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	336,528,000	289.018.000	241.365.000	83.51
	a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	236.528.000	203.538.000	156.059.000	76.67
	b. Sub Kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	100.000.000	85.480.000	85.306.000	99.79
	Total	29.675.350.674	28.920.696.809	24.400.726.782	84.37

BAB IV PENUTUP

Kami selaku penyelenggara pemerintahan, menyadari bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2021 belum bisa memuaskan semua pihak dan masih banyak yang perlu kita perbaiki bersama. Untuk itu, kami pun membuka hati untuk menerima kritik, saran, serta masukan yang konstruktif dari semua pihak. Kami yakin dan berharap bahwa dengan kebersamaan yang terus kita bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara akan lebih baik dari masa lalu dan mampu memenuhi aspirasi masyarakat di masa yang akan datang.

Akhirnya, kunci untuk mencapai keberhasilan tersebut adalah mutlak perlu adanya komitmen yang kuat dan konsistensi semua pihak, baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat, didukung dengan semangat kebersamaan seluruh komponen masyarakat. Dengan dilaksanakannya kunci tersebut maka kita boleh yakin bahwa masa depan Kabupaten Kutai Kartanegara yang beradab akan bisa kita wujudkan.

Tenggarong, 17 Februari 2022

Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Ir. Muhammad Taufik
NIP. 19670625 199203 1 007

SUMBER DATA KINERJA

1. RPJMD 2016 - 2021
2. Perubahan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2016-2021
3. Rencana Kerja 2021
4. Laporan Capain Kinerja Kegiatan APBD tahun 2021
5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021
6. Perjanjian Kinerja 2021
7. Bidang Pengembangan dan Perbenihan
8. Bidang Sarana Produksi
9. Bidang Usaha Penyuluh
10. Bidang Perlindungan
11. Data Statistik 2016,2017,2018,2019,2020 dan 2021

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**

Satua Kerja Perangkat Daerah : DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Tahun Anggaran : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN YANG MENDUKUNG INDIKATOR	ANGGARAN	
				APBD	APBD - P
URUSAN RUTIN					
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	Nilai SAKIP	81	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	27,774,407,273	26,727,207,508
URUSAN PERTANIAN					
Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Persentase Penurunan Pekebun Miskin	5	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan	-	-
Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	10,15	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1,064,415,401	1,420,795,401
			Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100,000,000	139,747,700
			Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	300,000,000	256,633,200
			Perizinan Usaha Pertanian	100,000,000	87,115,000
			Penyuluhan Pertanian	336,528,000	289,018,000
TOTAL ANGGARAN				29,675,350,674	28,920,516,809

Tangerang, 17 Februari 2022
Kepala Dinas Perkebunan,
Kabupaten Kutai Kartanegara



Ir. H. NUHAMAD TAMFIK
Pemula Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670625 199203 1 007

Matrik Pengukuran Kinerja Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Satua Kerja Perangkat Daerah : DINAS PERKEBUNAN
Tahun Anggaran : 2021

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	81	77	95 %
2	Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Persentase Penurunan Pekebun Miskin	5	0	0 %
3	Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	10,15	7,20	71 %

Tenggarong, 17 Februari 2022

Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Kutai Kartanegara,



ILH. MUHAMAD TAUFIK
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670625199203 1 007

**LAPORAN REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DINAS PERKEBUNAN TERHADAP INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	REALISASI (%)
1	2	3	4		5	6	7
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP	81.00	77.00	95%
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	100%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	15 Laporan	100%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	12 bulan	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	15 laporan	15 Laporan	100%
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	1 laporan	1 laporan	100%
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	1 laporan	1 laporan	100%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 dokumen	2 dokumen	100%
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21 orang	19 Orang	100%
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 orang	15 orang	100%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	7 layanan	7 layanan	100%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 jenis	6 jenis	100%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	26 Jenis	26 jenis	100%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Jenis	5 jenis	100%
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 jenis	3 jenis	100%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	3.000 eksemplar	3.000 eksemplar	100%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	495 orang/hari	495 orang/hari	100%
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	1,352 berkas	1.352 berkas	100%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	12 bulan	12 bulan	100%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100%
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12 bulan	12 Bulan	100%
				2. Jumlah pameran yang diikuti	2 kali	1 Kali	50%
				3. Jumlah pengelolaan Website	1 kegiatan	1 Kegiatan	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	REALISASI
					5	6	(%) 7
1							
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	121 unit	121 unit	100%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan,	117 unit roda 4 dan roda 2	117 unit roda 4 dan roda 2	100%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4 unit	4 unit	100%
2	Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Persentase Penurunan Pekebun Miskin					0%
3	Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan	Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Perkebunan	248.161 Ha	252.132 Ha	100%
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi	65 Unit	65 Unit	100%
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Luas pengadaan bibit & herbisida	3 Ha	4 Ha	100%
				Luas pengadaan pupuk	42 Ha	42 Ha	100%
				Jumlah pengadaan alat panen dan pasca panen	65 unit	107 unit	100%
				Luas pemeliharaan Kebun Dinas	19 Ha	14 Ha	100%
				Luas pengadaan bibit & herbisida	30 Ha	30 Ha	100%
				Luas pengadaan bibit & herbisida	10 Ha	10 Ha	100%
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak,	1 Kegiatan	1 Kegiatan
			Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pembibitan Tanaman Perkebunan	1.500 benih	1.500 benih	100%
			PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun dan Jumlah Embung Yang Dibangun	1 dokumen	1 dokumen	100%
			Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	1 dokumen	1 dokumen	100%
			Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah Dokumen Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 dokumen	1 dokumen	100%
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	1 dokumen	1 dokumen	100%
			PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan	93.33%	91.47%	99%
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan	100 Ha	128 Ha	100%
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura,	Luas pengendalian OPT Perkebunan (Dinas)	40 Ha	49 Ha	100%
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dikelola	21.550 Ha	23.173 Ha	100%
			Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan,	1. Jumlah Kelompok Tani Perduh Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	10 kelompok	16 kelompok	100%
			PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1. Jumlah Penerbitan STDB	200 Surat (STDB)	159 Surat (STDB)	82,5%
				2. Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	21 Surat (PUP)	12 Surat (PUP)	
			Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Dibina	221 pelaku	171 pelaku	82,5%
			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	1. Jumlah pekebun yang mendapatkan STDB	200 surat (STDB)	159 Surat (STDB)	82,5%
				2. Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	21 surat (PUP)	12 Surat (PUP)	82,5%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	REALISASI (%)
					5	6	7
1			PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	1.91%	1.91%	100%
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang dibina	9 kelompok tani	22 kelompok tani	100%
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1. Jumlah Kelompok Tani yang dibina	5 Kelompok Tani	18 kelompok tani	100%
			Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Lembaga Pekebun yang Dibentuk/Bermitra	4 lembaga	4 lembaga	100%
Total							98%

Tenggarong, 17 Februari 2022

Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Kutai Kartanegara

DINAS PERKEBUNAN

Ir. MUNDIAD TAUFIK
Pembina Utama Muda (IV/2)
NIP. 19670625 199203 1 007

MATRIK CAPAIAN KINERJA 2017-2021
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Satua Kerja Perangkat Daerah : DINAS PERKEBUNAN

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja					Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	65	68	72	76	81	67	69	79	79	77
2	Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Persentase Penurunan Pekebun Miskin	0	0	5	5	5	0	0	0	5	0
3	Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	8,68	9,03	9,39	9,76	10,15	8,68	6,53	7,04	7,00	7,20

Tenggarong, 17 Februari 2022
Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Kutai Kartanegara,


Ir. H. MUHAMAD TAUFIK
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19670625 199203 1 007

**LAPORAN REALISASI KEUANGAN TERHADAP INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERKEBUNAN TERHADAP INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
				APBD-Murni(Rp)	APBD-P(Rp)	REALISASI KEUANGAN	
						(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	27,774,407,273	26,727,207,508	22,393,456,326	83.79
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	762,444,000	543,768,400	458,876,800	84.39
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	443,068,000	276,480,000	227,743,400	82.37
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	84,000,000	84,000,000	62,900,000	74.88
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	235,376,000	183,288,400	168,233,400	91.79
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22,973,566,033	22,282,178,596	18,263,756,687	81.97
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22,745,446,033	22,186,838,596	18,168,416,687	81.89
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	228,120,000	95,340,000	95,340,000	100.00
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	121,400,000	121,400,000	120,700,000	99.42
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	81,660,000	81,660,000	81,660,000	100.00
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	39,740,000	39,740,000	39,040,000	98.24
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	253,736,200	232,458,200	229,848,200	98.88
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	183,736,200	162,458,200	161,348,200	99.32
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70,000,000	70,000,000	68,500,000	97.86
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,156,574,880	1,066,403,071	1,045,755,598	98.06
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,225,000	8,225,000	8,225,000	100.00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	288,448,880	347,385,071	331,789,290	95.51
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93,578,000	8,420,000	8,420,000	100.00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55,020,000	55,020,000	55,020,000	100.00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25,860,000	25,860,000	25,860,000	100.00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550,465,000	486,515,000	482,271,253	99.13
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	134,978,000	134,978,000	134,170,055	99.40
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,936,424,100	1,910,796,100	1,714,201,372	89.71
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	339,481,092	339,481,092	249,398,008	73.46
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78,693,000	78,693,000	76,127,900	96.74
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,518,250,008	1,492,622,008	1,388,675,464	93.04
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	570,262,060	570,203,141	560,317,669	98.27
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	399,598,000	399,598,000	392,180,703	98.14
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170,664,060	170,605,141	168,136,966	98.55

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
				APBD-Murni(Rp)	APBD-P(Rp)	REALISASI KEUANGAN	
						(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Persentase Penurunan Pekebun Miskin					
3	Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan	Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Pengembangan Prasarana Pertanian Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, PERIZINAN USAHA PERTANIAN Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian PENYULUHAN PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	1,064,415,401 964,415,401 964,415,401 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 0 300,000,000 300,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 336,528,000 336,528,000 236,528,000 100,000,000	1,420,975,401 1,324,355,401 1,324,355,401 96,620,000 96,620,000 139,747,700 139,747,700 69,009,000 70,738,700 256,633,200 256,633,200 97,445,000 81,278,200 77,910,000 87,115,000 87,115,000 87,115,000 289,018,000 289,018,000 203,538,000 85,480,000	1,288,850,100 1,210,180,100 1,210,180,100 78,670,000 78,670,000 139,012,400 139,012,400 68,944,000 70,068,400 255,605,000 255,605,000 97,125,000 80,900,000 77,580,000 82,437,956 82,437,956 82,437,956 241,365,000 241,365,000 156,059,000 85,306,000	90.70 91.38 91.38 81.42 81.42 99.47 99.47 99.91 99.05 99.60 99.60 99.67 99.53 99.58 94.63 94.63 94.63 83.51 83.51 76.67 99.80
Total				29.675.350.674	28.920.696.809	24.400.726.782	84.37

17 Februari 2022
 Kepala Dinas Perkebunan
 Kabupaten Kutai Kartanegara
DINAS PERKEBUNAN
 Ir. H. MUHAMMAD TAUFIK
 Pembina Utama Muda (IV/4)
 NPA.19670625.1992031.007

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN DINAS PERKEBUNAN TAHUN 2021

NO	SASARAN PEMERINTAH DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	TARGET PROGRAM	REALISASI PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	KINERJA CAPAIAN PER TRIWULAN				ANGGARAN		
													I	II	III	IV	APBD-Murni (Rp)	APBD-P (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	Nilai sakin	77	79.76	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	25%	25%	25%	25%	762,444,000	543,768,400	Peny. Keuangan dan Program
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	15%		35%	50%	443,068,000	276,480,000	Peny. Keuangan dan Program
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	25%	25%	25%	25%	84,000,000	84,000,000	Peny. Keuangan dan Program
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	25%	25%	25%	25%	235,376,000	183,288,400	Peny. Keuangan dan Program
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	25%	25%	25%	25%	22,973,566,033	22,282,178,596	Peny. Keuangan dan Program
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	25%	25%	25%	25%	22,745,446,033	22,186,838,596	Peny. Keuangan dan Program
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	15 laporan	25%	25%	25%	25%	228,120,000	95,340,000	Peny. Keuangan dan Program
										Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 dokumen	25%	25%	25%	25%	121,400,000	121,400,000	Umum dan Tatakelaksanaan
										Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	1 laporan	20%		30%	50%	81,660,000	81,660,000	Umum dan Tatakelaksanaan
										Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	1 laporan	25%	25%	25%	25%	39,740,000	39,740,000	Umum dan Tatakelaksanaan
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 dokumen	25%	25%	25%	25%	253,736,200	232,458,200	Kepegawaian
										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21 orang		15%	35%	50%	183,736,200	162,458,200	Kepegawaian
										Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 orang	20%	20%	30%	30%	70,000,000	70,000,000	Kepegawaian

NO	SASARAN PEMERINTAH DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	TARGET PROGRAM	REALISASI PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	KINERJA CAPAIAN PER TRWULAN				ANGGARAN			
													I	II	III	IV	APBD-Murni(Rp)	APBD-P(Rp)	PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	7 layanan	25%	25%	25%	25%	1,156,574,880	1,066,403,071	Umum dan Tatakelaksanaan	
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 jenis	25%	25%	25%	25%	8,225,000	8,225,000	Umum dan Tatakelaksanaan	
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	26 Jenis	25%	25%	25%	25%	288,448,880	347,385,071	Umum dan Tatakelaksanaan	
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Jenis	25%	25%	25%	25%	93,578,000	8,420,000	Umum dan Tatakelaksanaan	
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 jenis	25%	25%	25%	25%	55,020,000	55,020,000	Umum dan Tatakelaksanaan	
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	3.000 eksemplar	25%	25%	25%	25%	25,860,000	25,860,000	Umum dan Tatakelaksanaan	
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	495 orang/hari	25%	25%	25%	25%	550,465,000	486,515,000	Umum dan Tatakelaksanaan	
										Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Penolpt dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	1,352 berkas	25%	25%	25%	25%	134,978,000	134,978,000	Umum dan Tatakelaksanaan	
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	25%	25%	25%	25%	1,936,424,100	1,010,796,100	Umum dan Tatakelaksanaan	
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	25%	25%	25%	25%	339,481,092	339,481,092	Umum dan Tatakelaksanaan	
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	100%				78,693,000	78,693,000	Umum dan Tatakelaksanaan	
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12 bulan	25%	25%	25%	25%	1,518,250,008	1,492,622,008	Umum dan Tatakelaksanaan	
									2. Jumlah pameran yang diikuti		2 kali									Umum dan Tatakelaksanaan
									3. Jumlah pengelolaan Website		1 kegiatan									
										Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	121 unit	25%	25%	25%	25%	570,262,060	570,203,141	Umum dan Tatakelaksanaan	
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	117 unit roda 4 dan roda 2	25%	25%	25%	25%	399,598,000	399,598,000	Umum dan Tatakelaksanaan	
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4 unit		50%	25%	25%	170,664,060	170,605,141	Umum dan Tatakelaksanaan	

NO	SASARAN PEMERINTAH DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	TARGET PROGRAM	REALISASI PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	KINERJA CAPAIAN PER TRIWULAN				ANGGARAN						
													I	II	III	IV	APBD-Murni (Rp)	APBD-P (Rp)	PENANGGUNG JAWAB				
													14	15	16	17	18	19	20				
1					Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatkan Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Dalam Arti Luas	Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Dibina	200 Surat (STDB) dan 21 Surat (PUP)	159 Surat (STDB) dan 12 Surat (PUP)	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Dibina	221 pelaku					100,000,000	87,115,000	Usaha dan Penyuluhan				
					Penyuluhan Pertanian	Meningkatkan Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Dalam Arti Luas	Jumlah kelompok tani yang dibina	1.91%	1.91%	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	1. Jumlah pekebun yang mendapatkan STDB 2. Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	200 surat (STDB) 21 surat (PUP)	25%	25%	25%	25%	100,000,000	87,115,000	Usaha dan Penyuluhan				
										Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang dibina	9 kelompok tani					25%	25%	25%	25%	336,528,000	289,018,000	Usaha dan Penyuluhan
										Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1. Jumlah Kelompok Tani yang dibina 2. Jumlah Pekebun Milenial yang dibina	5 Kelompok Tani 0 Pekebun Milenial	25%	25%	25%	25%					236,528,000	203,538,000	Usaha dan Penyuluhan
										Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Lembaga Pekebun yang Dibentuk/Bermitra	4 lembaga	25%	25%	25%	25%					100,000,000	85,480,000	Usaha dan Penyuluhan
Total																					29,878,350,674	28,920,896,809	

Tenggarong, 17 Februari 2022

Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Kutai Kartanegara

IKHL MUHAMAD TAUFIK
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670625 199203 1 007

